

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Separatisme atau gerakan separatis merupakan salah satu dari berbagai isu yang dapat terjadi di sebuah negara, yang dianggap berpotensi untuk mengancam integrasi nasional dari sebuah negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), separatisme merupakan “paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri).”¹ Sedangkan menurut James D. Fearon, separatisme sendiri merupakan sebuah perilaku bangsa yang memberontak karena menginginkan suatu kebebasan, akibat terjadinya pelanggaran dari prinsip kebebasan untuk menentukan haknya sendiri atau *self determination*.² Separatisme juga dianggap sebagai sebuah dampak dari adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh negara kepada sekelompok golongan atau ras, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, yang dapat menimbulkan sebuah sentimen tersendiri.³

Dalam konteks global, peristiwa disintegrasi yang ditandai dengan terpecahnya sebuah negara akibat gerakan separatis pertama kali terjadi di Uni

¹ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, *Arti Kata Separatisme - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, 2020, <https://kbbi.web.id/separatisme>. (diakses 22 Februari, 2020).

²James D. Fearon, “*Separatist Wars, Partition and World Order*”, Conference Paper, Stanford University, (2004): 6-11.

³ *Ibid*, hal 11.

Soviet pada tahun 1991. Beberapa negara di Eropa Timur seperti Cekoslowakia dan Yugoslavia juga mengalami hal yang serupa pada zaman itu.⁴ Arus globalisasi yang semakin dinamis dan tidak pasti, serta krisis ekonomi pasca Perang Dingin diasumsikan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya proses disintegrasi sebuah negara. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia merupakan negara yang sering mengalami isu separatisme, khususnya pada akhir periode dari Pemerintahan Orde Baru. Beberapa isu separatis yang kebanyakan ditandai dengan adanya pemberontakan adalah antara lain gerakan separatis GAM, OPM dan RMS serta sejumlah gerakan lainnya. Keberadaan mereka tentu saja dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka.⁵ Dari beberapa gerakan separatis diatas dan seluruh gerakan separatis lainnya yang sudah berhasil ditumpas, masih ada satu wilayah yang memiliki kelompok separatis aktif didalamnya yaitu Papua, yang menuntut pemerintah Indonesia untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai negara independen.

Konflik separatisme di Papua atau yang dijuluki oleh dunia internasional sebagai Papua Barat: *The West Papua Issues*, merupakan konflik separatisme berkepanjangan di wilayah Papua dan Papua bagian barat yang terjadi pasca kesepakatan *The Act of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Pepera merupakan pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintah Indonesia, dimana 1.025 pemuda Papua (dari jumlah penduduk kurang lebih 800.000 jiwa) memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Namun setelah

⁴Manuel Castells, "*End of Millenium. The Information Age: Economy, Society and Culture*", Vol III, Oxford: Blackwell Publishers, 1998, pp. 213-215.

⁵Adrian Vickers, "From the Old Order to the New", Chapter 6, In *A History of Modern Indonesia*, 2nd ed, Cambridge: Cambridge University Press, (2013): 146-173.

kesepakatan tersebut, masyarakat Papua merasa tidak dihargai karena merasa tidak dilibatkan sepenuhnya dan menganggap bahwa mereka tetap bukan bagian dari Indonesia. Namun sejarah mencatat, jauh sebelum terjadinya kesepakatan Pepera, Papua sendiri sudah mengalami berbagai ketidakadilan mulai dari penandatanganan *The New York Agreement* (1962) yang menyatakan bahwa Papua bukan lagi menjadi wilayah jajahan Belanda melainkan termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada dibawah pengawasan *The United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA).⁶ Setelah UNTEA memutuskan untuk keluar dari Papua dan memberikan kedaulatan penuh bagi Indonesia, Papua mulai mengalami proses aneksasi pada 1 Mei 1963, dimana Pulau Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) dan 10 operasi militer lainnya yang menewaskan puluhan ribu rakyat Papua.⁷

Awal mula perlawanan yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua terhadap pemerintah Indonesia ditandai dengan terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1965. Tujuan utama dari dibentuknya organisasi ini sebenarnya adalah untuk menuntut berakhirnya dominasi pemerintahan Indonesia (Jakarta) di Papua dan menuntut agar Papua diberi hak untuk menjadi negara merdeka.⁸ OPM bukan menjadi satu-satunya organisasi separatis di Papua, melainkan terdapat juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menjadi sayap militer OPM, Tentara Revolusi *West Papua* (TRWP), Komite

⁶ Neles Tebay, "*West Papua: The Struggle for Peace with Justice*", Catholic Institute for International Relations, London, (2005): 5.

⁷ Decki Natalis Pigay, "Evolusi Nasionalisme dan Sejarah: Konflik Politik di Papua", *PT. Dinamika Daya Andalan*, Jakarta, (2000): 112-114.

⁸ Neles Tebay, "*West Papua: The Struggle for Peace with Justice*", Catholic Institute for International Relations, London, (2005): 6-7.

Nasional Papua Barat (KNPB), dan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP. ULMWP merupakan organisasi separatis yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Benny Wenda, seorang mantan pemimpin OPM. ULMWP dibentuk di Vanuatu dan berhasil menarik perhatian dari masyarakat internasional salah satunya Inggris, terkait dengan isu kemerdekaan Papua Barat.⁹ Beberapa negara dalam dunia internasional yang mendukung dan memberikan perhatian khusus kepada isu Papua terkait dengan kemerdekaannya antara lain Kepulauan Cook, Nauru, Tuvalu dan Vanuatu. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya akan membahas tentang keterlibatan aktor internasional secara luas, namun juga akan memfokuskan penelitian kepada organisasi internasional yang digunakan untuk menginternasionalisasikan isu Papua oleh Vanuatu. Vanuatu merupakan salah satu negara pulau di Samudera Pasifik bagian selatan yang tergabung ke dalam organisasi *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

MSG sendiri merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang dibentuk berdasarkan solidaritas etnis dari beberapa negara dengan ras Melanesia, yang melingkupi beberapa negara antara lain Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Vanuatu dan Kelompok Front Pembebasan Nasional dan Sosialis Kanak (FLNKS) dari Kaledonia Baru (*New Caledonia*). Indonesia tadinya diterima dalam keanggotaan MSG sebagai *observer*, namun sekarang sudah naik status menjadi *Associate Member* (AM). Anggota yang resmi ditetapkan sebagai

⁹ Adriana Elisabeth. "Dimesi Internasional Kasus Papua." *Jurnal Penelitian Politik "Papua Menggugat"*, Vol. 3, No. 1 (2006): 44-45.

observer pada saat ini hanyalah ULMWP dan Timor Leste.¹⁰ MSG berdiri sebagai organisasi perkumpulan politik pada tahun 1988 dan berhasil diresmikan di bawah Hukum Internasional sebagai organisasi sub-regional melalui penandatanganan *Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group* pada Maret 2007.¹¹ MSG sendiri memiliki markas utama di Port Vila, Vanuatu, dan dari semua anggota MSG, Vanuatu merupakan satu-satunya negara yang paling mendukung kemerdekaan Papua dengan prinsip “*Melanesian Way*” yang menganggap bahwa krisis di Papua adalah isu Melanesia yang harus diselesaikan oleh orang-orang yang tergolong dalam ras Melanesia dan bukan Indonesia.¹² Vanuatu bahkan sempat menunjukkan dukungannya secara aktual kepada Papua dengan menginternasionalisasikan isu dan diskriminasi Papua ke beberapa forum internasional PBB.¹³

Indonesia sendiri telah melakukan beberapa kerja sama pada era presiden SBY, kerja sama tersebut dilakukan untuk meminimalisir intervensi yang dilakukan oleh pihak MSG terhadap politik domestik Indonesia, tindakan dari pihak Indonesia membuahkan hasil dengan membawa Papua Nugini dan Fiji kepada pihak pro Indonesia, namun Indonesia tetap gagal membawa Vanuatu

¹⁰ Tess Newton Cain, “*The Melanesian Spearhead Group: What Is It, and What Does It Do?*”, *The Interpreter*, February 27, 2017, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/melanesian-spearhead-group-what-is-it-and-what-does-it-do> (diakses 23 Februari 2020).

¹¹ “Melanesian Spearhead Group Msg: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg. (diakses 26 Januari 2021).

¹² Windu Jusuf dan Husein Abdulsalam, “*Siapa Kawan Dan Lawan Indonesia Di Melanesia Soal Papua Merdeka?*”, *Tirto.id*, February 6, 2019, <https://tirto.id/siapa-kawan-dan-lawan-indonesia-di-melanesia-soal-papua-merdeka-df4R>. (diakses 23 Februari, 2020).

¹³ Adriana Elisabeth. “Dimesi Internasional Kasus Papua.” *Jurnal Penelitian Politik “Papua Menggugat”*, Vol. 3, No. 1 (2006): 49.

yang tidak lain merupakan pihak yang paling berpengaruh dan mendukung keras pembebasan Papua dari Indonesia.

Vanuatu merupakan anggota dari MSG yang hingga saat ini menjadi pendukung utama pembebasan Papua dari Indonesia. Terdapat beberapa kejadian yang didalangi oleh Vanuatu terhadap usahanya untuk membebaskan Papua dari Indonesia, yakni seperti Undang-undang Wantok Blong Yumi, dimana dalam UU tersebut Vanuatu menyatakan kemerdekaan Papua dari Indonesia dan dibentuknya ULMWP di Vanuatu yang sekarang diketuai oleh Jacob Rumbiak, yang kemudian menjadi pemicu utama kerusuhan di Papua. Vanuatu juga sudah beberapa kali melaporkan pelanggaran HAM terhadap Papua yang dilakukan oleh Indonesia ke badan PBB, dan beberapa kali dikecam keras oleh Indonesia karena hal tersebut dianggap tindakan yang manipulatif. Dan pada akhirnya, dalam sidang PBB, Indonesia menyatakan Negara kepulauan Vanuatu sebagai pendukung gerakan separatisme. Tindakan dibalik usaha untuk memisahkan Papua dari Indonesia yang telah dilakukan oleh MSG, yang dipimpin oleh Vanuatu telah melibatkan beberapa pihak internasional dalam permasalahan pembebasan Papua.¹⁴

Selain Vanuatu yang merupakan negara kecil, ada beberapa negara besar yang ikut berpartisipasi dalam mengamati dan bahkan mengomentari perkembangan isu Papua di Indonesia, salah satunya Australia. Australia dikenal sebagai negara yang berperan dalam menjaga kestabilan kawasan di Pasifik Selatan. Sebagai negara maju, Australia memiliki kebijakan luar negeri untuk

¹⁴ Putri, Virgina Maulita, "Vanuatu, Negara Yang Mendukung Gerakan Separatis Di Papua", Detiknews, September 30, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4728070/vanuatu-negara-yang-mendukung-gerakan-separatis-di-papua>. (diakses 21 April, 2020).

mencapai kepentingan globalnya dalam lingkup yang cukup luas, khususnya ke daerah Pasifik Selatan. Kawasan di Pasifik Selatan sendiri sedari dulu memang sering digunakan oleh kekuatan besar dunia sebagai ajang pentas global untuk mencapai kepentingan negaranya masing-masing.¹⁵ Australia sendiri sebagai negara berkekuatan besar tidak mau melewatkan kesempatan untuk meraup keuntungan di kawasan tersebut. Australia melakukan banyak investasi dan membuka perusahaan di kawasan Pasifik Selatan. Australia juga melihat bahwa kawasan di Pasifik Selatan, termasuk Papua, sangat bergantung dengan investasi asing dan pemasukan dari bidang pariwisata. Australia mulai ikut andil dalam isu Papua ketika Australia melihat bahwa Indonesia dianggap kurang mampu dalam menanggapi berbagai proses Internasionalisasi isu Papua. Australia sendiri tergabung ke dalam forum regional *Pacific Islands Forum* (PIF) dan menyandang status sebagai penggagas dan *observer*. Australia menginginkan terjadinya stabilitas keamanan di kawasan Pasifik Selatan demi kepentingan nasionalnya sendiri dan demi menghindari adanya dominasi Tiongkok di daerah tersebut, secara Tiongkok sedang mencoba untuk memperluas pengaruhnya di berbagai belahan dunia, hal tersebut dilihat sebagai ancaman bagi Australia, yang juga beraliansi dengan Amerika Serikat.¹⁶

Berbagai cara dilakukan oleh Australia agar keamanan regional terjaga di kawasan tersebut, salah satunya dengan mendukung proses internasionalisasi isu Papua. Australia ikut membantu proses tersebut dengan menyediakan kantor-

¹⁵ Muhammad Naser El-Haq dan Muhammad Saef El-Islam. "Australia sebagai Kekuatan Regional dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kawasan Pasifik." *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 1 (2020): hal. 49-68.

¹⁶ *Ibid*, hal 51-53.

kantor upaya kemerdekaan Papua bagi para aktivis yang aktif menyuarakan kemerdekaan Papua.¹⁷ Bagi Australia sendiri, tidak begitu penting apakah Australia harus berpihak ke Indonesia atau ke negara-negara yang pro akan kemerdekaan Papua, selama Australia masih tetap memiliki cara apapun untuk menjaga stabilitas kawasan di Pasifik Selatan dan mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam kelanjutannya, Vanuatu dan negara anggota MSG diduga hanya digunakan sebagai instrumen yang menimbulkan sentimen antar negara oleh negara besar yang berkepentingan, seperti Australia, untuk mendukung negaranya dalam mencapai kepentingan nasional.

Makalah penelitian ini akan menitikberatkan kepada keterlibatan Vanuatu di dalam MSG dan Australia sebagai salah satu negara besar yang memiliki kepentingan dalam internasionalisasi isu Papua. Alasan dari penulis memilih kedua negara ini sebagai subjek dari penelitian penulis adalah karena Vanuatu merupakan negara di Pasifik Selatan yang paling gencar dalam menginternasionalisasi isu Papua dan Australia merupakan salah satu negara besar yang ada di kawasan Pasifik, yang pernah memiliki sejarah sebagai penjaga keamanan di kawasan tersebut dengan mengintervensi beberapa konflik yang terjadi disana. Jadi, penulis ingin melihat apa peran dan kepentingan mereka dalam isu Papua ini sehingga kedua negara ini tertarik dengan isu ini dan memainkan peran yang dominan di dalamnya.

¹⁷ Adriana Elisabeth. "Dimensi Internasional Kasus Papua." *Jurnal Penelitian Politik "Papua Menggugat"*, Vol. 3, No. 1 (2006): 47.

1.2 Rumusan Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu separatisme di Papua sudah terlalu banyak menyebabkan dampak yang buruk bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Konflik di Papua sendiri sudah banyak menarik perhatian dari berbagai aktor internasional, yang berlandaskan kepentingan nasional dari masing-masing aktor. Oleh karena itu, berikut rumusan masalah yang penulis ingin jawab dan jelaskan di dalam penelitian ini:

1. Apa kepentingan Vanuatu di dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dalam internasionalisasi isu Papua?
2. Apa kepentingan Australia dalam internasionalisasi isu Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis akan menganalisis dan juga memberi beberapa gambaran terhadap upaya apa saja yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua dan aktivis dari Papua hingga dapat menarik perhatian dari dunia internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa gerakan kemerdekaan Papua terus meminta dukungan dari negara lain seperti Australia dan Inggris dengan tujuan mendapatkan dukungan yang signifikan untuk menjadi negara merdeka. Penulis juga akan meneliti tindakan dari berbagai negara, khususnya negara Melanesia dalam meresponi internasionalisasi isu tersebut.

Penulis juga ingin menganalisis peran aktor asing di dalam kasus ini, khususnya Vanuatu di dalam MSG, apakah mereka hanya semata-mata mendukung Papua untuk menjadi negara yang merdeka atau ada kepentingan lain

yang menguntungkan mereka dibalik konflik ini. Australia sebagai salah satu negara besar di Pasifik yang mengambil bagian dalam isu ini juga akan menjadi salah satu objek kajian dalam penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan mengkaji awal keterlibatan MSG di dalam konflik Papua, apa latar belakang dan kepentingan Vanuatu di dalam MSG. Dalam prosesnya, penulis akan meneliti kepentingan nasional yang melandasi terlibatnya Australia di dalam proses internasionalisasi isu Papua dan apakah negara kecil seperti Vanuatu dapat menggunakan MSG sebagai instrumennya dalam menyampaikan kepentingan nasionalnya. Selain itu, penulis akan mengkaji dan meneliti respon dan upaya dari pemerintah Indonesia secara singkat dalam memanfaatkan forum regional MSG untuk membantu penyelesaian isu Papua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis juga akan mencantumkan beberapa saran praktis dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji penelitian ini dari sudut pandang pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Papua yang sudah dicampurtangani oleh berbagai pihak asing tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat dan gambaran yang jelas mengenai keterlibatan aktor asing di dalam konflik Papua dan apa kepentingan utama yang melandasi keterlibatan mereka di dalam isu tersebut. Penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat dikorelasikan dengan studi hubungan internasional dari sudut pandang realis, yang akan membahas berbagai konflik tentang *power* dan *security* serta

kepentingan nasional dari negara-negara yang terlibat. Serta, penulis berharap agar penelitian dapat memberikan wawasan mengenai konflik yang terjadi di Papua serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya yang merupakan pendukung gerakan separatisme Papua, agar isu ini tidak berangsur terus menerus dan menjadi kekhawatiran bagi persatuan Indonesia. Penulis berharap agar makalah penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dunia akademis serta dapat dijadikan referensi untuk merealisasikan penyelesaian dari konflik Papua.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan menggunakan sistematika penulisan memuat beberapa penguraian yang akan mencakup gambaran besar dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I - PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menjabarkan tentang latar belakang dari judul, dengan memberikan penjelasan yang diawali dengan pemberontakan dan krisis yang terjadi di Papua, proses internasionalisasi Papua, dan keterlibatan aktor asing Vanuatu lewat MSG dan Australia dalam isu Papua. Di dalamnya, penulis juga akan merumuskan masalah, menjabarkan tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II – KERANGKA BERPIKIR

Pada bab kerangka berpikir, penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang berisi sumber-sumber yang akan digunakan oleh penulis untuk melanjutkan penelitian ini. Penulis membagi tinjauan pustaka ke dalam 4 fokus utama yaitu Regionalisme negara Melanesia di kawasan Pasifik Selatan, Peran

Vanuatu di dalam MSG, Peran Australia dalam menjaga stabilitas kawasan di Pasifik Selatan, dan Internasionalisasi isu Papua oleh MSG. Dalam bab ini juga penulis akan menjabarkan tinjauan teori realis dan konsep Kepentingan Nasional, Regionalisme, Internasionalisasi Isu, Etnonasionalisme, dan Geostrategi dan Geopolitik.

BAB III – METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan cara penulisan dan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Bab ini juga akan menjabarkan bagaimana cara penulis mendapatkan dan mengolah data yang relevan dengan penelitian ini pada bagian teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV – ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat, penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dari rumusan masalah berupa penjelasan, disertai dengan data, teori, dan konsep yang akan menunjang penulisan. Penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak secara langsung, namun menjabarkannya menjadi sebuah narasi dan literatur yang didukung dari tinjauan pustaka di Bab II.

BAB V – KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan di bab ini, penulis akan meringkas inti dan hasil dari penulisan di bab pembahasan. Penulis juga akan memberikan penjelasan singkat mulai dari pendahuluan sampai bab terakhir untuk mengakhiri penelitian ini. Penulis juga akan memberikan saran-saran dari penelitian yang akan diteliti dan untuk penelitian berikutnya.